



Pilkada Kota Padangsidempuan 2024: Catatan dan Koreksi

Effan Zulfiqar, Safran Efendi Pasaribu, Soritua Ritonga, Natalia Parapat, Khoiruddin Nasution

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

corresponding author: effan.zulfiqar@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Studi ini mengkaji dinamika politik dan perilaku pada pemilu Kota Padangsidempuan tahun 2024, yang merupakan pemilu daerah serentak keempat sejak otonomi kota tersebut pada tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu kali ini tingkat partisipasi pemilih yang rendah yaitu sebesar 71,1%, dengan banyak pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan haknya. Memilih karena berbagai alasan, termasuk rendahnya kepercayaan terhadap kandidat dan dianggap kurang penting dalam berpartisipasi dalam pemilu. Studi ini juga menyoroti maraknya “serangan fajar” atau politik uang, di mana para kandidat membagikan uang dan bentuk keuntungan materi lainnya kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan mereka. Meskipun terdapat larangan hukum terhadap praktik-praktik tersebut, praktik-praktik tersebut masih merajalela dan telah menjadi bagian integral dari dinamika pemilu di Kota Padangsidempuan. Studi ini juga mengeksplorasi peran koalisi politik dan fragmentasi suara di antara kandidat yang berbeda, yang menyebabkan perpecahan suara dan pada akhirnya mempengaruhi hasil pemilu. Selain itu, artikel ini membahas dampak pemilu terhadap tata kelola dan pembangunan kota, menyoroti perlunya kepemimpinan yang efektif dan tata kelola yang baik untuk mengatasi permasalahan mendesak di kota ini, seperti pembangunan infrastruktur, korupsi, dan penyediaan layanan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika politik yang kompleks dan perilaku pemilih pada pemilu Kota Padangsidempuan tahun 2024, menyoroti perlunya reformasi pemilu dan tata kelola yang baik untuk mendorong nilai-nilai demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di kota tersebut.

Kata kunci: Pilkada tahun 2024, Kota Padangsidempuan, Catatan dan koreksi

Abstract

This study examines the political dynamics and voter behavior in the 2024 Padang Sidempuan City elections, which is the fourth simultaneous regional election since the city's autonomy in 2001. The research method used in this article is qualitative research with a descriptive approach and literature study. The research results show that in this election the voter participation rate was low, namely 71.1%, with many voters choosing not to exercise their rights. Vote for various reasons, including low trust in candidates and perceived lack of importance in participating in elections. The study also highlights the rise of “dawn strikes” or money politics, in which candidates distribute money and other forms of material benefits to voters in exchange for their support. Even though there is a legal ban on these practices, these practices are still rampant and have become an integral part of the election dynamics in Padangsidempuan City. This study also explores the role of political coalitions and vote fragmentation among different candidates, which causes vote splitting and ultimately influences election results. Additionally, this article discusses the impact of elections on the city's governance and development, highlighting the need for effective leadership and good governance to address pressing problems in the city, such as infrastructure development, corruption, and public service delivery. Overall, this research provides insight into the complex political dynamics and voter behavior in the 2024 Padang Sidempuan City elections, highlighting the need for electoral reform and good governance to promote democratic values and sustainable development in the city.

Key words: 2024 Regional Election, Padangsidempuan City, Notes and corrections



PENDAHULUAN

Kota Padang Sidempuan adalah salah satu dari 389 kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pilkada Serentak 27 November 2024 yang lalu. Pilkada kali ini merupakan yang keempat kalinya digelar setelah statusnya berubah menjadi daerah otonom 17 Oktober 2001.

Kota Padang Sidempuan luas wilayahnya 159,28 km² dengan jumlah penduduk tahun 2023 236.217 jiwa yang menyebar di enam kecamatan, 32 kelurahan dan 42 desa. Masyarakatnya dominan beretnis Batak yang terbagi dalam sub etnis Angkola, Mandailing¹ dan Batak Toba.

Adapun etnis Jawa dan Minangkabau populasinya cukup banyak setelah etnis Batak. Sementara etnis Nias, Sunda dan beberapa etnis lainnya jumlahnya masih sedikit. Mayoritas penduduk beragama Islam sekitar 89% dan sisanya beragama Kristen, Katolik, dan Budha. Sekalipun didiami warga yang multi etnis dan agama berbeda. Kerukunan antar masyarakat tetap terjaga sampai hari ini. Dalam catatan sejarah di wilayah ini belum pernah terjadi konflik yang bersifat horizontal yang berlatar belakang etnis atau agama. Warga masyarakat yang heterogen bisa saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan tersebut. Termasuk perbedaan pilihan politik pada saat Pemilu tidak menyebabkan adanya konflik. Semua bisa saling menghargai pilihan yang berbeda, baik itu dalam kontestasi Pemilu legislatif (Pileg) dan Pilkada.

Perhelatan Pilkada Kota Padang Sidempuan yang digulirkan pertama kali tahun 2007, 2012, 2018 dan terakhir 2014 telah memunculkan berbagai fenomena yang cukup menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh lagi. Ada beberapa fenomena yang sangat bertolak belakang dengan ciri masyarakat kota yang dalam kacamata sosiologis disebut lebih rasional dalam pengambilan keputusan. Bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan karena tingkat pendidikan mereka yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan². Ternyata dalam pilihan politik saat pilkada 27 November yang lalu masyarakat Kota Padang Sidempuan tidak terlalu rasional dalam menentukan pilihannya. Malah lebih cenderung pada pilihan yang bersifat transaksional. Termasuk nilai-nilai pengamalan agama tidak terlalu signifikan berpengaruh dalam penentuan pilihan politik masyarakat. Dimana motif pragmatis masih menjadi penentu pilihan politik mereka dalam menentukan calon yang dipilih, meskipun secara faktual sulit untuk dibuktikan.

Tapi sesungguhnya uang menjadi penentu pilihan politik yang seharusnya tidak harus terjadi karena pemberi dan penerima uang dalam Fiqih Islam sama-sama masuk neraka³. Sepertinya ancaman Allah SWT tersebut tidak menjadi penghalang maraknya kasus politik uang. Sebagai masyarakat yang dianggap punya religiusitas kuat juga tidak terpengaruh bagi upaya menolak terjadinya politik uang. Kota Padang Sidempuan yang dianggap masyarakatnya lebih terdidik dan cerdas juga tidak berdaya menghadapi serbuan "money politik". Keberadaan demikian banyak kampus perguruan tinggi di kota⁴ ini tidak juga bisa menjadi benteng terakhir dari masif dan terencananya⁵ "serangan fajar" jelang pencoblosan 27 November lalu.

¹ Orang Mandailing tidak mau disebut sebagai bagian dari sub etnis Batak. Tapi etnis tersendiri yang disebut dengan entnis Mandailing yang sama sekali tidak punya kaitan dengan etnis Batak dari sejarah antropologisnya.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, 2000, Jakarta, hal.162.

³ "Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka" (HR Ath-Thabrani).

⁴ Satu-satunya Kota di Sumatera Utara yang punya perguruan tinggi terbanyak ada di Kota Padang Sidempuan. Kampus tersebut antara lain IAIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Universitas Graha Nusantara, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Universitas Aufa Royhan dan beberapa Sekolah Tinggi dan Akademi lainnya.

⁵ Serangan fajar adalah istilah populer di Indonesia yang merujuk pada praktik politik uang menjelang pemilu atau pilkada. Berdasarkan Pasal 515 dan Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, politik uang meliputi pemberian uang, barang, atau jasa untuk memengaruhi pilihan pemilih. Contoh bentuk Serangan Fajar: Uang tunai. Paket sembako. Voucher pulsa atau bensin. Barang lain bernilai ekonomi. "Apa itu Serangan Fajar? Pemberian Uang atau Barang Jelang Pilkada 2024 Konon Hukumnya Haram dalam Islam", dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5804722/apa-itu-serangan-fajar-pemberian-uang-atau-barang-jelang-pilkada-2024-konon-hukumnya-haram-dalam-islam?page=5>, diakses 20 November 2024.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi literatur. Pengumpulan data dengan metode penelitian kualitatif deskriptif studi literatur dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan. Sedangkan Analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dengan cara menggambarkan kondisi atau situasi yang diteliti. Data yang digunakan dalam metode ini berupa kata-kata atau deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koalisi Retak

Pemilihan Presiden 2014 yang lalu memunculkan apa yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM merupakan gabungan 10 partai politik yang terdiri 4 partai politik parlemen, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Adapun empat partai non-parlemen, PBB, Gelora Indonesia, PSI, Garuda dan satu partai lokal Partai Aceh dan partai nonpartisipan Pemilu 2024, PRIMA.

Kesepuluh partai politik tersebut mengusung Menteri Pertahanan RI waktu itu, Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024. Setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden ke 8 dan Gibran Rakabumin Raka terpilih sebagai Wakil Presiden. Menjelang Pilkada Serentak 2024, KIM kemudian berganti nama menjadi KIM Plus dengan masuknya PKB, PKS dan NasDem yang dulunya mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pemilihan Presiden 2024. Kemudian KIM ada tambahan PPP dan Perindo yang dulunya bergabung dengan PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud, MD di Pemilihan Presiden 2024. Partai lain yang masuk dalam KIM Plus belakangan adalah Partai Buruh dan Partai Ummat. Dengan demikian hanya PDIP yang berada di luar KIM plus tersebut.

Tindak lanjut dari KIM Plus adalah munculnya koalisi gemuk dalam perhelatan Pilkada serentak di 34 provinsi dan sebagian kecil di daerah kabupaten/kota⁶. Bahkan di beberapa daerah koalisi gemuk ini berubah menjadi moster yang memborong semua kursi DPRD untuk mengusung calon tunggal. Ada 37 daerah yang maju dengan pasangan calon tunggal Pilkada 2024 dan hanya dua daerah yang calon tunggal kalah melawan kotak kosong, yaitu di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang⁷. Di Pilkada Jakarta begitu terasa kuat aroma persaingan antara KIM Plus versus PDIP. Demikian juga di Jawa Barat, Jawa Tengah yang merupakan basis PDIP begitu kuat pertarungan antara KIM Plus dengan PDIP. Termasuk di Jawa Timur dan Sumatera Utara persaingan yang sama juga terjadi.

Solidnya dukungan KIM Plus dalam mengusung pasangan calon gubernur/wakil gubernur sama sekali tidak terjadi dalam pilkada di kabupaten/kota. Di Pilkada Kota Padangsidimpuan begitu kuat friksi di internal KIM Plus dalam megusung pasangan calon masing-masing. Partai Golkar yang menguasai 10 DPRD mengusung sendiri pasangan mantan

⁶ Ada 34 provinsi pasangan calon gubernur/wakil gubernur didukung KIM Plus. Artinya dari 37 provinsi di Indonesia hanya 3 provisi yang tidak solid dukungan KIM Plus. Hanya di Pilkada Jakarta KIM Plus kalah. Tapi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan beberapa provinsi lainnya KIM Plus berjaya. Sementara dukungan KIM Plus untuk Pilkada bupati dan wakil bupati hanya di 12 kabupaten dan walikota/wakil walikota di 5 kota. Solidnya KIM Plus mendukung pasangan calon di Pilkada gubernur di semua provisi tidak terjadi di tingkat kabupaten/kota. Sebaliknya yang terjadi masing-masing parpol mengalami keterpecahan dukungan terhadap pasangan calon.

⁷“Daftar Kemenangan Kotak Kosong di 36 Pilkada Calon Tunggal”, dalam [Shttps://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/56367/daftar-kemenangan-kotak-kosong-di-36-pilkada-calon-tunggal](https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/56367/daftar-kemenangan-kotak-kosong-di-36-pilkada-calon-tunggal). Sekedar catatan dalam Pilkada 2015 ada 3 calon tunggal di 269 daerah yang melaksanakan Pilkada. Pilkada tahun 2017 terdapat 9 calon tunggal dari 101 daerah yang menggelar Pilkada. Jumlah calon tunggal terus bertambah di Pilkada 2018 menjadi 16 calon tunggal di 170 daerah yang melaksanakan Pilkada. Tahun 2020 jumlah naik menjadi 25 calon tunggal dari total 270 daerah yang menggelar Pilkada. Sejak Pilkada 2015-2020, hanya ada 1 calon tunggal yang kalah di Pilkada Kota Makasar melawan kotak kosong.



Walikota sebelumnya Irsan Efendi Nasution dan Ali Muda Siregar tanpa harus berkoalisi dengan partai politik yang lain.

Adapun Gerindra yang merupakan motor utama KIM Plus bergabung dengan PKS, PKB dan PBB mengusung pasangan Letnan Dalimunthe dan Harry Pahlevi. Kalau direpresentasikan dengan jumlah kursi DPRD sebanyak 6 kursi minus PBB yang tidak punya kursi.

Hebatnya PDIP menjadi parpol pengusung pertama pasangan Hapendi Harahap dan Gempar Nauli Hamonangan Nasution. Setelah itu berturut-turut bergabung Demokrat, Hanura, PAN, Perindo dan NasDem yang merupakan koalisi pendukung utama KIM Plus minus Hanura. Keseluruhan jumlah kursi yang dikuasai di DPRD adalah 13 kursi.

Ternyata koalisi KIM Plus dominan mendukung pasangan Hapendi Harahap dan Gempar Nauli Hamonangan Nasution dibandingkan bergabung dengan Gerindra yang mendukung pasangan Letnan Dalimunthe dan Harry Pahlevi atau berlabuh dengan Golkar mendukung pasangan Irsan Effendi Nasution dan Ali Muda Siregar.

Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada relevansi antara kuatnya dukungan koalisi KIM Plus di pusat dengan yang terjadi di daerah yang begitu cair arah dukungannya terhadap pasangan calon. Elit pimpinan pusat parpol tidak mengharuskan dukungan yang sama di daerah, ada kebebasan pilihan dukungan. Meskipun penentuan pasangan calon yang didukung parpol keputusannya masih ditentukan oleh pusat bukan di level daerah.

Debat Publik Yang Sepi

Tanggal 24 September 2024 debat publik pertama tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Padang Sidimpuan berlangsung di Hotel Grand Mercure, Medan. Debat kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Hotel Four Point Kota Medan. Kedua acara debat publik ini disiarkan secara langsung di live iNews TV, live streaming di Youtube iNews TV, Youtube KPU Padang Sidimpuan <https://www.youtube.com/@kpupadangsidimpuan3369> dan FB KPU Padang Sidimpuan.

Debat publik yang berbiaya jutaan rupiah itu tidak begitu diminati masyarakat, baik itu siaran langsung saat debat ataupun siaran tunda, termasuk yang *diupload* di media sosial. Padahal diharapkan melalui debat publik yang diselenggarakan dua putaran tersebut bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk mendapatkan gambaran ideal siapa yang paling pantas memimpin kota ini lima tahun ke depan. Ternyata debat publik pertama live di iNews TV yang ditayangkan lewat *Chanel YouTube* KPU hanya disaksikan 324 penonton dan 24 orang yang menyukainya. Setelah dua hari jumlah yang menonton baru bertambah menjadi 5.528 kali penayangan dan disukai 91 orang. Bandingkan dengan jumlah masyarakat yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap tahun 2024 berjumlah 161.204 dengan jumlah penduduk 231.266 jiwa⁸. Artinya tidak sampai dua persen masyarakat yang bersengaja untuk menonton tayangan langsung debat publik tersebut. Apalagi tayangannya tidak langsung sudah pasti yang menonton jumlahnya lebih minim lagi. Bila debat publik pertama yang memajukan tema “Tingkatkan Kesejahteraan dan Pelayanan kepada Masyarakat, Majukan Kota Padangsidimpuan”, sepi peminat yang menonton tanyagannya. Maka sudah bisa dipastikan antusiasme masyarakat juga minim untuk menyaksikan debat publik kedua yang mengusung tema “Menyelesaikan Persoalan-Persoalan Daerah”.

Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa minat masyarakat minim untuk menonton tayangan langsung atau tunda debat publik Pilkada Kota Padang Sidimpuan yang diselenggarakan dua kali di Kota Medan. Antara lain, pada saat siaran live ditayangkan mayoritas masyarakat tidak ada di rumah atau jadwal penyelenggaraan debat tidak diketahui mereka. Atau bisa jadi karena faktor sosialisasi yang minim dari penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan debat publik.

⁸ “Debat Publik Pilkada 2024 Kota Padang Sidimpuan Minim Penonton”, dalam <https://www.metro-online.co/2024/10/debat-publik-pilkada-2024-kot.html>, diakses 10 November 2024.

Dari semua alasan di atas sebenarnya kurangnya minat masyarakat dalam menyaksikan debat publik tersebut lebih banyak alasan merasa tidak ada mamfaatnya dan merasa itu bukan menjadi sesuatu yang esensial. Demikian juga soal siapapun yang terpilih tidak lagi menjadi penting buat masyarakat. Padahal dipastikan setiap rumah punya TV dan setiap orang punya *gadget* yang bisa menangkap siaran langsung debat publik tersebut tanpa terikat dengan waktu, tempat termasuk kesibukan dalam tugas. Tapi itu semua tidak menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk menyaksikan tayangan debat publik yang live atau tunda di media sosial.

Anggaran besar untuk debat dan dilaksanakan di Kota Medan bukan di Padang Sidimpuan. Tidak dengan sendirinya membuat masyarakat punya minat untuk menyaksikannya. Harapan agar masyarakat yang punya hak pilih bisa lebih cerdas dalam menentukan pilihan setelah menyaksikan debat publik, tidak terwujudkan. Karena yang menonton tayangannya hanya satu persen saja dari 165.000 yang tercatat dalam DPT.

Yang disayangkan lagi yang jadi panelis bukan orang Padang Sidimpuan tapi orang Medan yang tidak terlalu faham dengan permasalahan yang ada di sini. Padahal banyak kampus di sini yang punya dosen yang mumpuni. Terlalu naif rasanya tidak memberdayakan para dosen yang ada. Atau mungkin kualitas para dosennya dianggap KPU Kota Padang Sidimpuan masih dibawah rata-rata para dosen yang ada di Medan?

Netralitas ASN Dipertanyakan

Ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah terjadi sejak perhelatan Pilkada pertama tahun 2005. Dukung mendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah begitu terencana, terstruktur dan masif terjadi. Padahal regulasi yang mengharuskan ASN netral jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f. Demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Pasal 4 (12) (12c) dan (13). Termasuk Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Semua aturan tersebut tidak serta merta menjadi pijakan bagi ASN untuk bersikap netral. Dalam kasus Pilkada Kota Padang Sidimpuan keterlibatan ASN begitu jelas. Petahana wali kota Irsan Effendi Nasution, Letnan Dalimunthe eks Sekretaris Daerah dan Pj wali kota dan Gempar Nauli Hamonangan Nasution yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKD dan Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Tidak yang bisa menjamin ketiganya tidak menggalang dukungan dari kalangan ASN tempat mereka selama ini bekerja.

Senyatanya tarik menarik dukungan dari kalangan ASN tersebut begitu kuat di antara mereka bertiga. Meskipun sulit mengungkap faktanya sebagaimana halnya dengan kasus serangan fajar yang nyata ada. Keterlibatan ASN dukung mendukung pasangan calon walikota memang terjadi sebagaimana yang diungkapkan beberapa media lokal online⁹.

Bahkan ada kasus yang sempat viral melibatkan kepala desa yang memberikan dukungan kepada salah satu calon. Padahal kepala desa termasuk pihak yang harus netral sebagaimana halnya ASN dalam pilkada. Faktanya beberapa kepala desa justru terlibat dalam dukung mendukung calon wali kota. Meskipun tidak terungkap, tapi keterlibatan kalangan kepala desa untuk memobilisasi dukungan waganya kepada salah satu pasangan calon kepala daerah begitu

⁹"Integritas ASN di Pemko Padangsidimpuan Diragukan Jelang Pilkada: Deretan Peristiwa Cederai Netralitas" dalam <https://kompasreal.com/integritas-asn-di-pemko-padangsidimpuan-diragukan-jelang-pilkada-deretan-peristiwa-cederai-netralitas/> diakses 23 Januari 2025 "Netralitas PNS dan Pejabat Pemko Padangsidimpuan di Pilkada Babak Belur", dalam <https://wartamandailing.com/2024/10/01/netralitas-pns-dan-pejabat-pemko-padangsidimpuan-di-pilkada-babak-belur/> diakses 23 Januari 2025. "Beredar Foto Oknum Lurah di Sidimpuan Nekat Hadiri Pertemuan Dengan Balon Wali Kota", dalam <https://lensakini.com/berita-pilihan/beredar-foto-oknum-lurah-di-sidimpuan-nekat-hadiri-pertemuan-dengan-balon-wali-kota/> diakses 23 Januari 2025. "Netralitas Tiga Oknum PNS Pemko Padangsidimpuan Diragukan", dalam <https://www.metro-online.co/2024/10/netralitas-tiga-oknum-pns-pemko-padangsidimpuan-diragukan.html> diakses 23 Januari 2025._

nyata. Bahkan ada rekaman percakapan yang viral seminggu sebelum hari pencoblosan antara salah satu pasangan calon dan kepala desa yang soal dukung mendukung tersebut¹⁰.

Marak “Serangan Fajar”

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK menjelaskan 'serangan fajar' adalah istilah populer dari politik uang. Awalnya istilah ini berasal dari kalangan militer. Diketahui tentara biasanya menyergap dan menguasai daerah target secara mendadak di pagi buta. Karena serangan fajar ini biasanya relatif berhasil, akhirnya praktik ini diadopsi di pemilihan oleh para peserta kontestasi politik¹¹.

Kebanyakan praktik 'serangan fajar' menasar *swing-voter* yang masih bingung ingin memilih kandidat mana. Karena partai-partai tak ingin menyia-nyiakan uang hanya untuk pemilih loyal atau inti. 'Serangan fajar' juga seringkali disebut dengan "*klientelisme elektoral*" sebagai distribusi imbalan material kepada pemilih saat pemilu saja¹².

Politik uang dalam bentuk serangan fajar merupakan pelanggaran pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 515 dan 523, ayat (1-3) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 187A, ayat (1-2). Disebutkan bentuk-bentuk serangan fajar tidak terbatas pada uang semata. Namun, juga dalam bentuk lain seperti paket sembako, voucher pulsa, voucher bensin, atau bentuk fasilitas lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang.¹³

Soal ancaman terhadap pelaku serangan fajar sudah sangat jelas aturannya dalam undang-undang yang disebutkan di atas. Tak tanggung-tanggung, ancaman pidananya maksimal 72 bulan plus denda ratusan juta rupiah bila terbukti melakukan serangan fajar/politik uang (*money politic*). Dalam Pasal 73 ayat (4) disebutkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar¹⁴. Begitu terang benderangnya undang-undang yang melarang terjadinya serangan fajar alias politik uang tidak juga membuat pelakunya sedikitpun punya rasa takut. Ancaman pidana penjara tiga tahun lebih dan denda ratusan juta tidak serta merta membuat ciut nyali para pelakunya. Ancaman hukuman pidana tersebut seperti dianggap sepi saja.

¹⁰"Beredar Rekaman Percakapan Diduga Cawalkot Sidimpuan Ancam Kades", dalam <https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2024/11/13/185104/beredar-rekaman-percakapan-diduga-cawalkot-sidimpuan-ancam-kades/> diakses 2 Februari 2025. Rekaman percakapan yang diparodikan itu mulai beredar pada Rabu 13 November 2024 malam dengan durasi 1 menit 9 detik di media sosial Facebook dan group WA. Percakapan diduga kuat suara si penelepon calon walikota berinisial IEN mantan walikota periode 2018-2023. Sedangkan si penerima telepon merupakan oknum Kades di Pudun Jae berinisial RIS. Kasus ini juga sudah dilaporkan RIS ke Polda Sumatera Utara pada 18 November 2024 karena merasa diancam oleh mantan Walikota Padang Sidimpuan IEH. "Kades Laporkan Calon Wali Kota Padang Sidimpuan ke Polda Sumut, Ini Dugaan Kasusnya", dalam <https://waspada.co.id/kades-laporkan-calon-wali-kota-padang-sidimpuan-ke-polda-sumut-ini-dugaan-kasusnya/> diakses 2 Februari 2025. "Kades di Sidimpuan Polisikan Cawalkot Irsan Efendi, Ngaku Diancam", dalam <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7646680/kades-di-sidimpuan-polisikan-cawalkot-irsan-efendi-ngaku-diancam> diakses 2 Februari 2025.

¹¹"Hajar Serangan Fajar", dalam <https://aclc.kpk.go.id/hajarseranganfajar> dan "'Serangan Fajar' di Pilkada 2024: Arti, Dampak, dan Sanksinya", dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7657822/serangan-fajar-di-pilkada-2024-arti-dampak-dan-sanksinya>, diakses 5 Desember 2024.

¹² Ibid.,

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 187 A ayat 1 dan 2.

¹⁴ Ibid.,

Seperti halnya dalam Pilkada Kota Padang Sidimpuan serangan fajar berlangsung secara masif, cepat dan terencana. Meskipun untuk mengungkap fakta hukum terjadinya serangan fajar sulit. Tapi sudah menjadi rahasia umum hal tersebut memang terjadi. Artinya tidak akan ada satupun kontestasi pilkada yang mengaku memberikan uang kepada konstituen agar memilihnya.

Dua hari sebelum hari pencoblosan, sumbuh menjelang pencoblosan sampai hari pencablosan serangan fajar itu masih terus berlanjut. Nominal uang yang ditebarkan antara 100 – 350 ribu rupiah perkepala bagi mereka yang sudah punya hak pilih. Pasar uang begitu ramai yang diperkirakan lebih 15 milyar uang beredar sampai di hari pencoblosan 27 November 2024.

Survei yang dilakukan Sahata Institute 24-26 November 2024 ini menunjukkan sebanyak 89% warga percaya adanya politik uang dalam Pilkada Kota Padang Sidimpuan dan mengaku mereka akan menerima bila ada kandidat kepala daerah yang memberikan uang. Bagi mereka, pilkada merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk mendapatkan uang segar dari para elite yang ingin menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota¹⁵.

Ada beberapa faktor yang mendasari mengapa serangan fajar masih dianggap para aktor politik/peserta Pilkada menjadi pilihan untuk memenangkan kompetisi lima tahunan tersebut. Antara lain, Serangan fajar/praktik politik uang masih dianggap paling efektif mempengaruhi pilihan pemilih. Tidak adanya sanksi hukum yang tegas sebagaimana yang diatur dalam perundang-undang yang menyebabkan tidak adanya rasa takut bagi para pelaku serangan fajar.

Faktor lain, budaya politik yang permisif terhadap praktik korupsi dan kolusi menjadi dasar makin terencana dan masifnya serangan fajar. Serangan fajar juga dianggap sesuatu yang wajar saja sebagai bentuk imbalan/pengganti uang karena para pemilih tidak bisa bekerja pada saat pencoblosan. Serangan fajar dianggap seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dari dinamika perhelatan pemilu. Artinya serangan fajar akan terus terjadi sebagai bagian dari dinamika pemilu itu sendiri.

Rendahnya Partisipasi Pemilih

Berdasarkan 98,5% data rekapitulasi yang telah masuk dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), angka partisipasi pemilih Pilkada 2024 sebesar 68,1%. Angka tersebut diperkirakan menjadi yang terendah sejak pilkada serentak pertama kali diselenggarakan dan turun secara signifikan jika dibandingkan dengan pilkada tahun 2017, 2018, dan 2020. Partisipasi pemilih pada pilkada 2024 juga berada di bawah rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2015—2020 sebesar 73%, serta jauh lebih rendah dari angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2024 yang mencapai 81,78%¹⁶.

Hal yang sama juga terjadi di Pilkada Kota Padang Sidimpuan tingkat partisipasi masyarakat menurun tajam dari target tingkat partisipasi pemilih di atas 80 persen¹⁷. Partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Padang Sidimpuan tercatat sebesar 71,1%, menurun dibandingkan tingkat partisipasi pada pemilu legislatif 2024 yang mencapai 73%¹⁸.

Artinya jumlah yang tidak menggunakan hak pilih lebih banyak dibandingkan dengan suara yang diperoleh pasangan nomor urut 2 pemenang pilkada 2024 sebanyak 43.778 suara.

¹⁵ "Warga Padangsidimpuan Permisif dengan Amplop Saat Pilkada Serentak 2024", 28 November 2024, dalam <https://www.sinartabagsel.web.id/2024/11/warga-padangsidimpuan-permisif-dengan.html>, diakses 5 Desember 2024.

¹⁶ Nurfadhilah Arini, Info Singkat, Vol. XVI, No. 23/I/Pusaka/Desember/2024, "Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih", dalam https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-23-I-P3DI-Desember-2024-2343.pdf, diakses 10 Desember 2024

¹⁷ "KPU Padangsidimpuan Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Segmen Pemuda". dalam <https://pionernews.com/2024/11/berita/kpu-padangsidimpuan-tingkatkan-partisipasi-pemilih-di-segmen-pemuda/>, diakses 10 Desember 2024.

¹⁸ "Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2024 Menurun", dalam <https://www.rri.co.id/daerah/1172493/partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2024-menurun>, diakses 10 Desember 2024

Dimana tercatat yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 47.985 dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 113.801¹⁹ orang dari 161.786 orang yang terdaftar dalam DPT.

Sebagai perbandingan, hal yang sama juga terjadi saat pilkada tahun 2018 partisipasi pemilih juga termasuk rendah hanya sampai diangka 70,77%. Yang tidak menggunakan hak pilih dengan berbagai alasan sebanyak 29,23%²⁰. Setidaknya data ini juga mengindikasikan rendahnya minat masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada pada waktu lima tahun yang lalu.

Rendahnya tingkat partisipasi di pilkada 2018 dan 2024 karena masyarakat merasa tidak ada hal yang penting untuk terlibat aktif selain mengharapkan sejumlah uang. Atau mereka yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan uang sehingga merasa tidak ada keharusan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Aturan yang mengharuskan setiap pemilih wajib menunjukkan KTP/KTP-el untuk dapat memilih di TPS, meskipun sudah terdaftar di DPT. Termasuk salah satu penyebab mengapa banyak pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Sementara Kartu Keluarga (KK) tidak bisa digunakan menggantikan KTP/KTP-el tersebut. Ini menjadi penyebab mereka merasa tidak penting lagi ikut memilih.

Rendahnya partisipasi pemilih bisa juga karena ketidakpercayaan terhadap kandidat pasangan calon walikota dan wakilnya bisa membawa perubahan atau memberikan harapan-harapan baru lima tahun ke depan. Jadi ada semacam pesimisme di tengah masyarakat dengan jejak rekaman pasangan kandidat walikota dan wakil walikota. Atau terjadi semacam kebosanan di kalangan masyarakat karena jarak antara pemilu legislatif/pilpres dengan pilkada hanya hitungan bulan.

SIMPULAN

KPU Kota Padang Sidimpuan telah mengumumkan pemenang Pilkada pasangan nomor urut 2 Letnan Dalimunthe dan Harry Pahlevi dengan meraih 43.778 suara (39,43%). Adapun pasangan nomor urut 1, Irsan Efendi Nasution-Ali Muda Siregar, mendapat 38.660 suara (34,81%). Pasangan nomor urut 3, Hapendi Harahap-Gempar Nauli Hamonangan Nasution, memperoleh 28.611 suara (25,76%)²¹.

Pasangan Letnan Dalimunthe dan Harri Pahlevi yang menawarkan visi, "Bangkit Bersama Mewujudkan Kota Padang Sidimpuan MANTAP (Maju, Andal, Nyata, Tangguh, Aman, dan Profesional)." Akan diuji dalam lima tahun kedepan dengan visi mereka. Apakah hanya sebatas janji manis politik atau memang sebuah kenyataan manis buat masyarakat Kota Padang Sidimpuan sebagaimana visi dan misi yang mereka usung.

Kota yang kerap disebut Kota Salak ini, meskipun kebun salak terluas ada di kabupaten induk Tapanuli Selatan. Sesungguhnya menyimpan banyak permasalahan seperti lingkaran setan. Mulai dari masalah kinerja pemerintahan yang rendah, infrastruktur yang miskin, birokrat yang terjerat kasus korupsi, APBD yang terus mengalami defisit, PAD yang sangat minim dan pelayanan publik yang buruk. Lima tahun ke depan pasangan ini harus fokus untuk menyelesaikan semua masalah yang diwariskan walikota sebelumnya. Bila lebih sibuk memikirkan

¹⁹"Angka Warga Padangsidimpuan Tak Nyoblos Di Atas Suara Pemenang Pilkada", dalam <https://www.waspada.id/sumut/angka-warga-padangsidimpuan-tak-nyoblos-di-atas-suara-pemenang-pilkada/>, diakses 10 Desember 2024.

²⁰"Pemilihan Umum Walikota Padang Sidimpuan Tahun 2018", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Padangsidimpuan_2018, diakses 10 Desember 2024.

²¹"KPU Tetapkan Letnan-Harry Pemenang Pilkada Padangsidimpuan 2024", dalam <https://regional.kompas.com/read/2024/12/06/062523878/kpu-tetapkan-letnan-harry-pemenang-pilkada-padangsidimpuan-2024>, diakses 20 Desember 2024.



bagaimana mengembalikan dana miliaran yang sudah habis. Senyatanya semua masalah yang menelekung kota ini tidak akan pernah terselesaikan mereka dengan baik. Bisa jadi akhir ceritanya berurusan dengan KPK sebagaimana yang menjerat banyak kepala daerah karena lebih sibuk berburu uang pengganti yang habis di pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, Nurfadhilah, Info Singkat, Vol. XVI, No. 23//Pusaka/Desember/2024, "*Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih*" dalam https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-23-I-P3DI-Desember-2024-2343.pdf
- Candra, Septa, *Money Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu* dalam <https://umj.ac.id/opini/money-politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, 2000, Jakarta, hal.162.
- Prayitno, Adi, *Ironi Calon Tunggal Pilkada 2024*, 28 September 2024 dalam <https://uinjkt.ac.id/id/ironi-calon-tunggal-pilkada-2024>
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Angka Warga Padangsidimpuan Tak Nyoblos Di Atas Suara Pemenang Pilkada dalam <https://www.waspada.id/sumut/angka-warga-padangsidimpuan-tak-nyoblos-di-atas-suara-pemenang-pilkada/>, diakses 10 Desember 2024.
- "Apa itu Serangan Fajar? Pemberian Uang atau Barang Jelang Pilkada 2024 Konon Hukumnya Haram dalam Islam" dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5804722/apa-itu-serangan-fajar-pemberian-uang-atau-barang-jelang-pilkada-2024-konon-hukumnya-haram-dalam-islam?page=5>
- "Beredar Foto Oknum Lurah di Sidimpuan Nekat Hadiri Pertemuan Dengan Balon Wali Kota" dalam <https://lensakini.com/berita-pilihan/beredar-foto-oknum-lurah-di-sidimpuan-nekat-hadiri-pertemuan-dengan-balon-wali-kota/>.
- Calon Tunggal di Tengah Pragmatisme dan Hegemoni Elite Politik <https://rumahpemilu.org/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik/>
- Daftar Kemenangan Kotak Kosong di 36 Pilkada Calon Tunggal dalam [Shttps://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/56367/daftar-kemenangan-kotak-kosong-di-36-pilkada-calon-tunggal](https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/56367/daftar-kemenangan-kotak-kosong-di-36-pilkada-calon-tunggal).
- Debat Publik Pilkada 2024 Kota Padang Sidimpuan Minim Penonton, Minggu, 27 Oktober 2024 dalam <https://www.metro-online.co/2024/10/debat-publik-pilkada-2024-kot.html>, diakses 10 November 2024.
- "Daftar Provinsi Statgis yang Dimenangkan KIM Plus di Pilkada 2024", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241128101409-617-1171544/daftar-provinsi-statgis-yang-dimenangkan-kim-plus-di-pilkada-2024>.
- "Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?", dalam <https://www.liputan6.com/news/read/5811983/peta-politik-parpol-pilkada-2024-kim-plus-menang-telak-atas-pdip?page=3>
- "Netralitas PNS dan Pejabat Pemko Padangsidimpuan di Pilkada Babak Belur" dalam <https://wartamandailing.com/2024/10/01/netralitas-pns-dan-pejabat-pemko-padangsidimpuan-di-pilkada-babak-belur/>.
- "Netralitas Tiga Oknum PNS Pemko Padangsidimpuan Diragukan" dalam <https://www.metro-online.co/2024/10/netralitas-tiga-oknum-pns-pemko-padangsidimpuan-diragukan.html>.



- Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2024 Menurun dalam <https://www.rri.co.id/daerah/1172493/partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2024-menurun> , diakses 10 Desember 2024.
- Pemilihan Umum Walikota Padang Sidempuan Tahun 2018 dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Padangsidempuan_2018, diakses 10 Desember 2024.
- "Serangan Fajar" di Pilkada 2024: Arti, Dampak, dan Sanksinya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7657822/serangan-fajar-di-pilkada-2024-arti-dampak-dan-sanksinya>.
- Hajar Serangan Fajar" dalam <https://aclc.kpk.go.id/hajarseranganfajar> dan "'Serangan Fajar' di Pilkada 2024: Arti, Dampak, dan Sanksinya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7657822/serangan-fajar-di-pilkada-2024-arti-dampak-dan-sanksinya>.
- "Hasil Lengkap Pilkada 37 Provinsi: KIM Kuasai 26 Daerah, PDIP Menang 6 Pilgub" , dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/67539cc1632a4/hasil-lengkap-pilkada-37-provinsi-kim-kuasai-26-daerah-pdip-menang-6-pilgub>
- "Integritas ASN di Pemko Padangsidempuan Diragukan Jelang Pilkada: Deretan Peristiwa Cederai Netralitas" dalam <https://kompasreal.com/integritas-asn-di-pemko-padangsidempuan-diragukan-jelang-pilkada-deretan-peristiwa-cederai-netralitas/>
- "Kades Laporkan Calon Wali Kota Padang Sidempuan ke Polda Sumut, Ini Dugaan Kasusnya", dalam <https://waspada.co.id/kades-laporkan-calon-wali-kota-padang-sidempuan-ke-polda-sumut-ini-dugaan-kasusnya/>.
- "Kades di Sidempuan Polisikan Cawalkot Irsan Efendi, Ngaku Diancam" dalam <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7646680/kades-di-sidempuan-polisikan-cawalkot-irsan-efendi-ngaku-diancam>.
- "KPU Tetapkan Letnan-Harry Pemenang Pilkada Padangsidempuan 2024", dalam <https://regional.kompas.com/read/2024/12/06/062523878/kpu-tetapkan-letnan-harry-pemenang-pilkada-padangsidempuan-2024>.
- KPU Padangsidempuan Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Segmen Pemuda dalam <https://pionernews.com/2024/11/berita/kpu-padangsidempuan-tingkatkan-partisipasi-pemilih-di-segmen-pemuda/>, diakses 10 Desember 2024.
- Warga Padangsidempuan Permisif dengan Amplop Saat Pilkada Serentak 2024, 28 November 2024 dalam <https://www.sinartabagsel.web.id/2024/11/warga-padangsidempuan-permisif-dengan.html>